

Analisis Hubungan Keberadaan Suaka Perikanan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dari Hasil Lelang Lebak Lebung

Analysis of the Relationship between Existence of Fishery-Protected Areas and Original Local Government Revenue of Ogan Komering Ilir Regency from Lelang Lebak Lebung Revenue

F Apriyanto^{1*)}, I Irawan¹, M Muslim²

¹Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia

²Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, Ogan Ilir, Indralaya 30662, Sumatera Selatan, Indonesia

^{*)}Penulis untuk korespondensi: ferlyapriyanto@gmail.com

Sitasi: Apriyanto F, Irawan, I, Muslim M. 2022. Analysis of the relationship between existence of fishery-protected areas and original local government revenue of Ogan Komering Ilir Regency from Lelang Lebak Lebung Revenue. *In: Herlinda S et al. (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-10 Tahun 2022, Palembang 27 Oktober 2022. pp. 443-449. Palembang: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).*

ABSTRACT

Fishery protected areas function to preserve fish resources. This area plays an important role in maintaining fish production. This study aimed to analyze the relationship between the existence of fishery-protected areas and the original local government revenue of Ogan Komering Ilir Regency. The method used is a desk study. The data obtained were analyzed descriptively. The results of the study show that revenue from L3S in sub-districts that have fishery-protected areas is higher than in those that do not. Jejawi District has the most fishery-protected areas, contributing the most to OKI Regency's original local government revenue. To increase L3S revenue, it is recommended to add the number of fishery-protected areas.

Keywords: reservaat, original local government revenue, lelang lebak lebung, OKI

ABSTRAK

Suaka perikanan merupakan areal tertentu yang berfungsi sebagai daerah perlindungan sumberdaya ikan. Areal ini berperan penting dalam menjaga produksi ikan di areal sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan keberadaan suaka perikanan dengan pendapatan hasil L3S di Kabupaten OKI. Metode yang digunakan yakni *desk study*. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa pendapatan dari hasil L3S pada wilayah kecamatan yang memiliki suaka perikanan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak memiliki suaka. Kecamatan Jejawi memiliki suaka perikanan paling banyak, memberi kontribusi paling besar terhadap PAD Kabupaten OKI dari hasil L3S. Untuk meningkatkan hasil L3S disarankan untuk memperbanyak suaka perikanan.

Kata kunci: reservat, PAD, lelang lebak lebung, OKI

PENDAHULUAN

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan. Menurut BPS OKI (2022), luas wilayah kabupaten ini yakni 19.023,47 km² dan berpenduduk sekitar 731.721 jiwa. Kabupaten OKI memiliki 18 Kecamatan yang terdiri atas 314 desa dan 13 kelurahan. Sekitar 75 persen dari luas wilayah Kabupaten OKI merupakan bentangan rawa dan 25 persennya merupakan daratan. Daerah ini dialiri oleh banyak sungai dan memiliki wilayah pantai dan laut. Wilayah pesisir Pantai Timur OKI meliputi Kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal dan Kecamatan Sungai Menang.

Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan (UU Nomor 45 Tahun 2009). Menurut PP No. 60 Tahun 2007, tipe kawasan konservasi perairan ada empat yakni taman nasional perairan, suaka alam perairan, taman wisata perairan dan suaka perikanan. Suaka perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembangbak jenis sumberdaya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan. Saat ini Kabupaten OKI memiliki enam suaka perikanan yang terletak di Kecamatan Pedamaran, Kecamatan Jejawi, Kecamatan Pampangan, Kecamatan SP. Padang dan Kecamatan Kota Kayuagung.

Lebak lebung merupakan istilah yang digunakan masyarakat Sumatera Selatan untuk menyebut nama perairan umum daratan yang meliputi rawa, rawa banjir dan sungai yang saling terhubung (Muslim, 2012). Kabupaten OKI memiliki kawasan lebak lebung terluas di Sumatera Selatan. Pengelolaan perairan lebak lebung di Kabupaten OKI dengan sistem lelang. Lelang lebak lebung (L3) yang saat ini dikenal dengan sebutan lelang lebak lebung dan sungai (L3S). Perairan yang dilelang disebut objek lelang. Orang yang menjadi pemenang lelang disebut pengemin. Nilai jual suatu objek lelang disebut pendapatan hasil L3S. L3S dilakukan setiap tahun bertempat di kecamatan masing-masing. Hasil L3S berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten OKI.

Keberadaan suaka perikanan di suatu wilayah kecamatan yang melaksanakan L3S diduga berpengaruh terhadap pendapatan hasil L3S. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan keberadaan suaka perikanan di wilayah kecamatan yang menyelenggarakan L3S dengan jumlah pendapatan hasil L3S.

BAHAN DAN METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah *desk study*. Menurut Hayat (2008), metode penelitian seperti ini disebut juga metode deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan L3S Kabupaten OKI Tahun 2014-2019. Data utama yang dikumpulkan adalah nilai jual objek lelang, areal kawasan suaka perikanan yang ada di kecamatan dalam Kabupaten OKI, serta data dan informasi pendukung dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis dilakukan secara induktif, yakni proses analisa dengan cara menarik kesimpulan umum dari data yang berhasil dikumpulkan dari yang berbentuk khusus. Dalam penelitian ini penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai pengaruh keberadaan suaka perikanan terhadap nilai jual objek L3S dan pada akhirnya tergambarkan dari jumlah pendapatan hasil L3S.

HASIL

Salah satu sumber PAD Kabupaten OKI adalah dari hasil L3S. Berdasarkan data yang diperoleh rata-rata PAD dari Tahun 2014-2019 sebesar Rp.6.535.237.516. PAD tertinggi diperoleh pada Tahun 2018 yakni sebesar Rp.8.070.090.368 sedangkan PAD terendah pada Tahun 2015 yakni sebesar Rp. 5.579.988.750. PAD Kabupaten OKI dari Tahun 2014-2019 disajikan pada Tabel 1.

Tabel. 1 PAD Kabupaten OKI Tahun 2014 – 2019 dari hasil L3S

PAD Tahun (Rp)						Rerata (Rp)
2014	2015	2016	2017	2018	2019	
5.936.406.000	5.579.988.750	6.493.944.975	6.234.437.500	8.070.090.368	6.896.557.500	6.325.871.642

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten OKI, 2014-2019

Suaka perikanan merupakan areal tertentu yang berfungsi menjaga stok ikan agar tetap stabil. Dari data yang diperoleh Kabupaten OKI memiliki tiga belas daerah suaka perikanan yang tersebar di enam kecamatan. Status hukum suaka-suaka tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur (SK.Gub), Surat Keputusan Bupati (SK.Bup) dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten OKI. Data suaka perikanan dan wilayah kecamatan lokasi keberadaan suaka tersebut serta status hukum penetapannya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Suaka perikanan di Kabupaten Ogan Komering Ilir

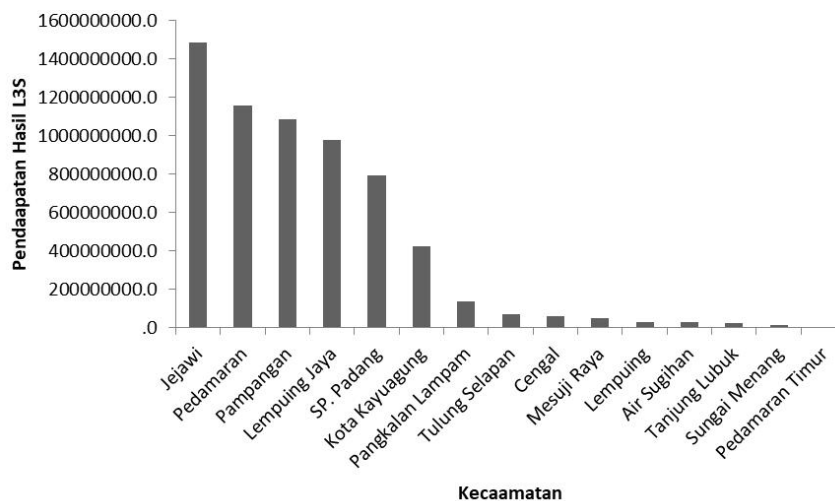
Nama Suaka	Lokasi (Kecamatan)	Status Hukum
Danau Teluk Rasau	Pedamaran	SK.Gub. No.398/Kpts/Iv/82, 19 Juni 1982
Danau Teluk Purun	Pedamaran	SK.Bup No.180/Sk/Bappeda/87, 01 Oktober 1987
Danau Teluk Gelam	Pedamaran	SK.Bup No.180/Sk/Bappeda/87,01 Oktober 1987
Anak Kemang, Anak Jele, Lebak Air Itam	Pedamaran	SK.Bup No.180/Sk/Bappeda/87, 01 Oktober 1987
Danau Lebak Nilang	Pedamaran	SK.Bup No.180/Sk/Bappeda/87 01 Oktober 1987
Lebak Danau Bubusan Eks Marga Jejawi	Jejawi	Perbup No. 345 Tahun 2007
Arisan Pembarap Delan	Pampangan	Perbup No. 07 Tahun 2005
Lebak Keman	Pampangan	Perbup No. 347 Tahun 2007
Arisan Lesir	Pampangan	Perbup No. 347 Tahun 2007
Arisan Jemaran di Lebak Keman	Pampangan	Perbup No. 347 Tahun 2007
Lubuk Lampam	Lempuing Jaya	Perbup No. 347 Tahun 2007
Arisan Lebung Mayan	SP.Padang	Perbup No. 07 Tahun 2005
Sungai Harapan di Lebak Belanti I	SP.Padang	Perbup No.347 Tahun 2007
Danau Teloko Eks Marga Teloko	Kayuagung	Perbup No. 497 Tahun 2008

Dari pendapatan hasil L3S Tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa enam kecamatan yang memiliki suaka perikanan memberikan kontribusi terbesar untuk PAD Kabupaten OKI dari sektor perikanan yaitu Kecamatan Jejawi (23,48%), Kecamatan Pedamaran (18,28%), Kecamatan Pampangan (17,14%), Kecamatan Lempuing Jaya (15,40%), Kecamatan SP.Padang (12,51%), dan Kecamatan Kota Kayuagung (6,67%). Data selengkapnya disajikan pada Tabel 3 dan Gambar 1.

Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-10 Tahun 2022, Palembang 27 Oktober 2022
“Revitalisasi Sumber Pangan Nabati dan Hewani Pascapandemi dalam Mendukung Pertanian Lahan Suboptimal secara Berkelanjutan

Tabel.3 Pendapatan hasil L3S per kecamatan dalam Kabupaten OKI Tahun 2014-2019

Kecamatan yang Menyelenggarakan L3S	Pendapatan Hasil L3S per Kecamatan (Rp)	Persentase Kontribusi Kecamatan terhadap PAD Kabupaten OKI dari Sektor Perikanan
Jejawai	1.485.366.667	23,48%
Pedamaran	1.156.696.667	18,28%
Pampangan	1.084.153.333	17,14%
Lempuing Jaya	974.333.333	15,40%
SP. Padang	791.051.667	12,51%
Kota Kayuagung	422.063.333	6,67%
Pangkalan Lampam	137.355.000	2,17%
Tulung Selapan	70.100.833	1,11%
Cengal	57.691.667	0,91%
Mesuji Raya	50.108.333	0,79%
Lempuing	29.133.333	0,46%
Air Sugihan	26.751.667	0,42%
Tanjung Lubuk	24.074.167	0,38%
Sungai Menang	14.821.642	0,23%
Pedamaran Timur	2.170.000	0,04%



Gambar 1. Pendapatan hasil L3S per kecamatan dalam Kabupaten OKI Tahun 2014-2019

Dari data pendapatan hasil L3S (Tabel 3) dan data kecamatan yang memiliki suaka perikanan (Tabel 2), terlihat bahwa ada hubungan antara keberadaan suaka perikanan di dalam wilayah kecamatan yang menyelenggarakan L3S terhadap pendapatan hasil L3S. Enam kecamatan yang memiliki suaka perikanan menghasilkan kontribusi terbesar dari hasil L3S terhadap PAD Kabupaten OKI dari sektor perikanan.

PEMBAHASAN

Topografi wilayah Kabupaten OKI didominasi daerah dataran rendah berupa rawa dan sungai. Lahan rawa dan sungai serta limpasan air di sekitarnya dikenal dengan nama lebak lebung. Di areal lebak lebung ini mengandung berbagai jenis sumberdaya ikan. Pengelolaan sumberdaya ikan di areal ini dilakukan dengan sistem lelang, yang disebut lelang lebak lebung dan sungai (L3S). L3S dilakukan di kecamatan yang memiliki areal lebak lebung.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa tingkat pendapatan hasil L3S masing-masing kecamatan terkait dengan keberadaan suaka perikanan di wilayah tersebut. Suaka perikanan merupakan daerah perlindungan bagi berbagai jenis ikan. Keberadaan suaka/daerah konservasi di suatu daerah/areal tertentu dapat menjaga kelestarian sumberdaya hewan di areal tersebut (Ludwig *et al.*, 2001). Dengan adanya suaka sebagai penyangga ekosistem perairan mampu berfungsi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Fungsi jangka pendek adalah bagaimana daerah ini bisa memulihkan ikan yang hampir punah ataupun menjaga jumlah stok ikan (Muslim, 2012; Azizah & Effendi, 2014). Masih banyaknya stok ikan dan jenis ikan yang masih sangat beragam mengindikasikan bahwa sebuah ekosistem itu berjalan dengan sehat dimana jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi di pasaran masih banyak ditemukan di perairan objek lelang lebak lebung dan sungai (Sale *et al.*, 2005),

Nilai jual objek lelang sangat erat hubungannya dengan jumlah ikan (stok ikan) yang tersedia, Semakin banyak ikan yang dihasilkan pada tahun sebelumnya maka nilai jual lebak lebung akan naik dan kompetisi lelang antara masyarakat akan semakin ketat untuk memperebutkan objek lelang tersebut (Brodziak *et al.*, 2004; Ditya *et al.*, 2013). Objek lelang yang berada di wilayah Kecamatan Jejawi harga jualnya tinggi disebabkan di perairan daerah ini ada suaka perikanan lebak Danau bubusan eks Marga Jejawi. Kedalaman perairan daerah ini menjadi sebagai zona inti daerah kawasan suaka tersebut. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya perairan kawasan suaka berpengaruh terhadap terjaganya kelestarian sumberdaya ikan yang ada (Mace, 2001; Kholis & Edwarsyah, 2022). Suaka perikanan juga berfungsi sebagai area tempat pemijahan ikan, dimana ikan-ikan dari suaka tersebut menyebar pada perairan umum atau objek L3S yang ada di wilayah Kecamatan Jejawi. Suaka perikanan berperan penting dalam upaya mempertahankan tingkat pendapatan masyarakat nelayan perairan umum daratan (Nasution *et al.*, 2012). Keberadaan anakan ikan (*juvenil*) sangat berperan penting sebagai pengganti ikan yang sudah tertangkap oleh nelayan. Jika perkembangan ataupun pertumbuhan *juvenil* terganggu dalam ekosistem perairan dapat mempengaruhi hasil produksi penangkapan ikan (Nasution *et al.*, 2012; Prianto, 2013).

Dari data yang disajikan pada Tabel 2 dan 3 serta Gambar 1, menunjukkan bahwa keberadaan daerah/areal suaka perikanan berpengaruh terhadap nilai jual objek L3S, sehingga pendapatan PAD dari hasil L3S makin meningkat. Suaka perikanan yang berada di Kecamatan Kayuagung, Lempuing, Lempuing Jaya, Pedamaran, SP.Padang, Jejawi dan Pampangan yang di dalamnya mempunyai objek L3S memberikan kontribusi hasil penjualan lelang yang sangat signifikan dibandingkan kecamatan lain yang tidak mempunyai suaka perikanan. Kecamatan Jejawi memiliki rata-rata hasil penjualan yang tinggi yaitu Rp.1.485.366.667.

Permasalahan serius yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya ikan sehingga berkurangnya objek lelang dan menurunnya harga jual objek diakibatkan dari pola pengelolaan perairan umum yang tidak baik dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan permasalahan pemanfaatan berlebihan (*over exploitation*), penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti bom, setrun ataupun racun, pergeseran kualitas habitat, pemanfaatan lahan, permasalahan lingkungan sungai (pencemaran) dan tidak adanya kawasan lindung. Peningkatan hasil tangkapan nelayan di Kecamatan Jejawi merupakan indikator keberhasilan dari daerah suaka perikanan. Dimana masyarakat telah mampu berusaha mentaati peraturan yang ada. Hasil tangkapan dicerminkan dari harga jual objek lelang dimana tren peningkatan hasil tangkapan di daerah Jejawi (Pramoda & Nasution, 2011; Ma'ruf *et al.*, 2019).

Besarnya akses masyarakat untuk memanfaatkan atau eksplorasi sumber daya ikan di lebak, lebung dan sungai tidak sebanding dengan jumlah suaka yang lama ataupun yang

baru ditetapkan. Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 18 Tahun 2010, dimana adanya kewajiban pemerintah daerah untuk membuat ataupun menambah jumlah daerah suaka perikanan di setiap daerah yang ada objek lelang lebak lebug (Perda Lebak Lebug No.18 Tahun 2010). Pemanfaatan atau pengelolaan objek lelang lebak, lebug dan sungai yang dilakukan oleh masyarakat (Pengemin) pada kenyataannya belum memperhatikan pentingnya daerah perlindungan ikan (suaka) bagi mereka eksplorasi sumber daya ikan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, reservat bagi mereka hanya kebijakan yang menghambat bagi mereka. Merujuk kepada tersebut dalam upaya menjaga kelestarian Sumber daya ikan dan lingkungan perairan lebak,lebug dan sungai kepala daerah (Bupati) menetapkan lebak,lebug dan sungai sebagai areal suaka perikanan atau suaka produksi ikan. Pada kenyataannya areal perikanan atau suaka perikanan di kabupaten ogan komering tidak bertambah dari tahun 2008 (Perda Lebak Lebug No.18 Tahun 2010; Oktaviani *et al.*, 2016; Ma’ruf *et al.*, 2019). Daerah yang tidak mempunyai suaka cenderung mengalami pengurangan produksi perikanan tangkap ataupun kontribusi terhadap PAD serta pertahunnya objek lelang terus berkurang (Nasution *et al.*, 2012; Harri & Nasyirudin 2020; Pramoda & Nasution, 2011; Ma’ruf *et al.*, 2019)

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa keberadaan suaka perikanan berpengaruh terhadap harga penjualan objek lelang sehingga pendapatan hasil L3S meningkat. Enam kecamatan yang memiliki suaka perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD Kabupaten OKI Tahun 2014-2019 dari sektor perikanan. Enam kecamatan tersebut yakni Kecamatan Jejawi (23,48%), Kecamatan Pedamaran (18,28%), Kecamatan Pampangan (17,14%), Kecamatan Lempuing Jaya (15,40%), Kecamatan SP.Padang (12,51%), dan Kecamatan Kota Kayuagung (6,67%).

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten OKI yang telah membantu penyediaan data dan informasi serta mengizinkan untuk memublikasikan data hasil L3S Kabupaten OKI Tahun 2014-2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Effendi H. 2014. Penerapan peraturan daerah nomor 18 tahun 2010 tentang pengelolaan lebak lebug dan sungai di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Hukum Uniski*, 3(2):.25–33.
- BPS. OKI. 2022. OKI dalam Angka. Badan Pusat Statistik. Kayuagung. Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2014. *Laporan Pelaksanaan L3S Tahun 2014*. Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2015. *Laporan Pelaksanaan L3S Tahun 2015*. Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2016. *Rekapitulasi L3S Tahun 2016*. Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2017. *Rekapitulasi L3Ss Tahun 2017*. Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir,. 2018. *Rekapitulasi L3S Tahun 2018*. Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Editor: Siti Herlinda et. al.

ISSN: 2963-6051 (print)

Penerbit: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI)

- Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2019. *Rekapitulasi L3S Tahun 2019*. Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Ditya YC, Rais AH, Nurdawati S. Wiadnyana NN. 2013. Peranan lebung sebagai sumber ekonomi bagi nelayan di Sumatera Selatan. *J. Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 8 (1): 39–47.
- Harris H, Nasyirudiin. 2020. *Lelang lebak lebung: pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal Sumatera Selatan*. Palembang, Refah Press.
- Hayat. 2018. *Buku Kebijakan Publik*. Malang, Intrans Publishing.
- Kholis MN, Edwarsyah. 2022. Kearifan lokal menuju SDGS'14: studi kasus lubuk larangan tepian napal Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Albacore*. 4 (2): 169–182.
- Ludwig D, Mangel M, Haddad B. 2001. Ecology, conservation, and public policy. *Annual review of ecology and systematics*. 481-517.
- Mace PM. 2001. A new role for MSY in single-species and ecosystem approaches to fisheries stock assessment and management. *Fish and Fisheries*. 2: 2–32.
- Ma'ruf I, Kamal MM, Satria A, Sulistiono A. 2019. Culture-based fisheries in rawa lebak lebung, South Sumatera, is it Applicable? *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 399 (1). DOI: 10.1088/1755-1315/399/1/012064.
- Muslim M. 2012. *Perikanan rawa lebak lebung sumatera selatan*. 1st ed. Palembang, Unsri Press.
- Nasution Z, Sumarti T, Adiwibowo S, Tjondronegoro SMP. 2012. Efektifitas dan alternatif kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum (studi kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan). *J. Kebijak. Perikanan. Ind.* 4 (1): 49–57.
- Oktaviani D, Prianto E, Puspasari R, 2016. Penguatan kearifan lokal sebagai landasan pengelolaan perikanan air daratan Sumatera. *J. Kebijak. Perikanan. Ind.* 8 (1): 1–12. .
- PP No. 60 Tahun 2007. Peraturan pemerintah tentang konservasi sumber daya ikan.
- Perbup No.7 Tahun 2005 Tentang penetapan lokasi areal suaka perikanan dalam bentuk suaka produksi ikan arisan lebung mayan di pematang bongor kec.sp.padang dan arisan pembarap delan kec.pampangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Perda No.18 Tahun 2010. Tentang lebak lebung di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kayuagung
- Pramoda R, Nasution Z. 2011. Transformasi pengelolaan perairan umum daratan. *J. Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 6 (2): 131–147.
- Prianto E. 2013. Kelimpahan dan sebaran juvenil ikan di paparan banjiran Lubuk Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir - Sumatera Selatan. In: *Prosiding Seminar Nasional Ikan ke 8*. p.77–86.
- Sale PF, Cowen RK, Danilowicz BS, Jones GP, Kritzer JP, Lindeman KC, Planes S, Polunin NVC, Russ GR, Sadovy YJ. Steneck RS. 2005. Critical science gaps impede use of no-take fishery reserves. *Trends in Ecology and Evolution*. 20 (2): 74–80. DOI: 10.1016/j.tree.2004.11.007.
- UU No 45 Tahun 2009. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Nasution Z, Sunarno MTD. 2017. Pengembangan model pengelolaan suaka perikanan di perairan umum daratan berbasis ko manajemen. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*. 1 (1): 17-29.